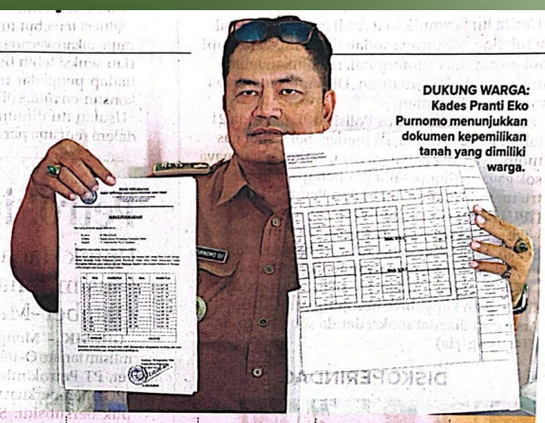
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO



EDISI RABU, 14 OKTOBER 2026

RINGKASAN BERITA HARI INI

Lahan Tinggal Diklaim Fasum, Warga Pranti Protes



DUKUNG WARGA: Kades Pranti Eko Purnomo menunjukkan dokumen kepemilikan tanah yang dimiliki warga.

ANGGER BONDAN/JAWA POS

Penerbitan 94 SHM Terkendala Status Tanah

POLEMIK LAHAN DI DESA PRANTI

Lebih dari **200** warga kesulitan mengurus SHM | Proses SHM yang diurus sejak **2015** mandek | Warga sempat demonstrasi ke BPN | Muncul klaim lahan ditempati sebagai fasum | *Sumber: Kades Pranti*

SIDOARJO – Sebanyak 94 warga Desa Pranti, Sedati, masih menanti kepastian Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang mereka tempati. Pengurusan yang dimulai sejak 2015 itu tak kunjung tuntas setelah muncul persoalan klaim lahan sebagai fasilitas umum (fasum) oleh Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar).

Kepala Desa (Kades) Pranti Eko Purnomo membantah bitan BPN tahun 2007 yang menunjukkan site plan jika hal tersebut bukan fasum. "Tanah tersebut diperoleh warga melalui proses jual beli hasil relokasi. Semuanya milik warga desa," kata Eko.

Dia juga memperlihatkan dokumen akad jual beli antara warga dengan Puskopkar pada 1996 sebagai bukti bahwa lahan tersebut sah milik warga. "Warga kami sudah lama menanti RW 02 Abdul Wahab menjelaskan, kawasan permukiman ditempati setelah warga direlokasi karena perluasan Bandara Juanda pada 1994. Proses pengurukan dan penempatan warga berlangsung pada periode berikutnya dengan pembagian dua petak tanah untuk setiap kepala keluarga.

Abdul Wahab menyebut, warga membeli tanah melalui proses yang melibatkan kami semakin sulit mendapatkan kepastian hukum atas tanah kami," ujarnya.

Pemkab Kaji Polemik Lahan

Pengacara Puskopkar Hartono menjelaskan, Puskopkar dahulu berperan menyiapkan lahan bagi warga yang terdampak perluasan Bandara Juanda. Soal klaim Puskopkar jika lahan berstatus fasum, dirinya meng- CKTR) Sidoarjo Moch Bachruni Aryawan mengatakan, pemkab meminta waktu hingga akhir Oktober untuk mengkaji polemik lahan di Desa Pranti. Pemerintah akan menelusuri dokumen dari masing-masing pihak sebelum menentukan langkah penyelesaian. "Dokumen yang akan diperiksa antara lain perizinan, proses penyediaan lahan, hingga berkas penerbitan sertifikat



TAK SESUAI STANDAR: Pemkab meminta seluruh jembatan cor yang menjadi akses warga dibongkar.

ANGGER BONDAN/JAWA POS

Lima Jembatan Cor Hambat Betonisasi Gedangan–Betro

SIDOARJO – Keberadaan lima jembatan cor milik warga menjadi salah satu persoalan dalam penataan atau betonisasi Jalan Gedangan–Betro. Jembatan-jembatan tersebut bakal dibongkar agar tidak mengganggu fungsi saluran air dan menghambat pembangunan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air (DPUB-MSDA) Sidoarjo Muhammad Makhmud mengatakan, penataan jembatan dilakukan seiring dengan pengerjaan betonisasi jalan. "Jembatan harus dibongkar karena menghalangi aliran air," katanya kemarin (13/10).

Menurut dia, jembatan seharusnya dibuat melengkung ke atas agar aliran air tetap lancar. Dalam pantauan *Jawa Pos*, terdapat sekitar lima jembatan cor yang melintasi sungai di sepanjang Jalan Gedangan–Betro. Jembatan tersebut digunakan sebagai akses menuju tempat usaha di tepi jalan.

Selain jembatan milik warga, pengerjaan betonisasi Jalan Gedangan–Betro juga berdampak pada lebar sungai di sisi jalan. Pelebaran jalan dari sekitar enam meter menjadi sembilan meter membuat sebagian sungai menyempit karena sebagian ruangnya digunakan untuk badan jalan. **(ful/hen)**

Minta Proyek Dipercepat dan Normalisasi Sungai Terpadu

Sidoarjo, Memorandum

Bupati Sidoarjo Subandi melakukan sidak progres pembangunan betonisasi ruas Jalan Gedangan–Betro, Senin (12/10). Dalam peninjauan itu, Subandi meminta pelaksana proyek mempercepat pekerjaan yang mengalami deviasi sekaligus memastikan rencana normalisasi sungai di sekitar kawasan dapat dilaksanakan secara terpadu.

Sidak dilakukan bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM SDA) Kabupaten Sidoarjo Mukhammad Makhmud, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, serta pelaksana proyek.

Subandi menyoroti bahwa pembangunan betonisasi jalan dengan nilai anggaran sekitar Rp23 miliar tersebut harus diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil peninjauan tadi, masih ada deviasi yang hampir 10 persen.

Padahal, penyelesaian proyek ditargetkan pada Desember 2026. "Masih ada deviasi 10 persen dari target yang harus dicapai hampir 34 persen dan bulan Desember 2026 harus selesai," ujar Subandi.

Ia meminta seluruh pihak yang terlibat segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah konkret untuk mengejar ketertinggalan progres. Koordinasi antara kontraktor, PPK, dan konsultan pengawas harus diperkuat agar kendala di lapangan dapat segera diselesaikan.



Bupati Sidoarjo sidak betonisasi Gedangsn-Betro.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan perlu diimbangi dengan penanganan saluran dan sungai di sekitarnya. Karena itu, ia meminta agar rencana normalisasi sungai turut jadi perhatian sehingga peningkatan kualitas jalan berjalan seiring dengan upaya mengurangi risiko banjir.

"Anggaran jalan ini kurang lebih Rp23 miliar. Kalau sudah dilakukan pembangunan, sekalian kita benahi sungainya agar normalisasi juga berjalan. Harapan kita, jalannya bagus dan normalisasi sungai juga terlaksana," katanya.

Subandi juga menyoroti sejumlah kendala di lapangan, di antaranya keberadaan kabel optik dan lampu yang mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Ia meminta agar persoalan tersebut segera dikoordinasikan dengan pihak terkait sehingga penanganannya tidak menghambat percepatan proyek.

Selain itu, penataan kawasan di sekitar jalan dan sungai juga perlu dilakukan sesuai perencanaan. Keberadaan warung, warung kopi, maupun bangunan yang berpotensi menghambat pekerjaan harus dikoordinasikan agar pelaksanaan konstruksi dan rencana normalisasi dapat berjalan optimal. **(hum/jok/fdn)**

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

200 Liter Susu Sapi Segar, Dikonsumsi Karyawan RSUD Notopuro Sidoarjo Setiap Selasa dan Jum at

Sidoarjo, Bhirawa

Program GEMAS atau Gerakan Minum Susu (GEMAS) yang dilakukan di RSUD Notopuro Sidoarjo, pada Selasa dan Jumat, setiap harinya menyediakan sekitar 200 liter susu segar yang dipasok dari peternak sapi lokal. Susu tersebut diperuntukkan bagi staf dan pegawai RSUD Notopuro Sidoarjo sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan di lingkungan kerja RSUD milik Pemkab Sidoarjo tersebut.

PLT Dirut RSUD Notopuro Sidoarjo, dr prima Dessy Kusuma Rakhmawati MKes, mengatakan program ini menjadi salah satu upaya rumah sakit dalam menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh staf serta karyawan, khususnya pegawai yang memiliki risiko kesehatan terkait pekerjaanya. "Ini bagian dari kepedulian rsud Notopuro terhadap kesehatan dan kesejahteraan pegawai, " komentarnya , Selasa (13/10) kemarin.

Komite K3 RSUD Notopuro Sidoarjo, Nanda Iskandar, ikut meyampaikan bahwa program GEMAS telah berjalan sejak 2024 lalu. Dalam pelaksanaannya, kata Nanda, program tersebut mengalami beberapa perubahan, mulai dari pemberian telur kukus, kemudian beralih ke susu kotak, hingga kini menggunakan susu segar. “Awalnya program ini menggunakan telur kukus, kemudian beralih ke susu kotak, dan sekarang menggunakan susu segar,” ujar Nanda.

Ia menjelaskan, penggunaan susu segar mulai diterapkan pada 2025 lalu atas permintaan direktur rumah sakit. Karena beberapa pertimbangan. Di antaranya, Susu segar mengandung protein, kalsium, serta berbagai vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Konsumsi susu sebagai bagian dari pola makan bergizi diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi dan mendukung pemeliharaan daya tahan tubuh pegawai **[kus.mg20.ca]**

Dipindai dengan CamScanner

HARIAN Bhirawa

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



DIKY SANSIRI/RADAR SIDOARJO

JELANG PERESMIAN: Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana meninjau persiapan KDMP Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Selasa (13/10).

Wabup Usul KDMP Beroperasi 24 Jam

KOTA-Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Sidoarjo didorong untuk memberikan pelayanan lebih luas kepada masyarakat. Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana mengusulkan agar gerai koperasi beroperasi selama 24 jam dengan menerapkan sistem kerja bergiliran bagi karyawan.

Usulan tersebut disampaikan Mimik saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) persiapan KDMP Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Selasa (13/10). Koperasi tersebut tengah mempersiapkan operasional dan dijadwalkan segera diresmikan dengan rencana kehadiran menteri.

Perempuan yang akrab disapa Mak Mimik itu menyebut persiapan KDMP Tambakrejo telah mencapai sekitar 50 persen. Saat ini, pengelola masih melengkapi stok barang kebutuhan pokok sebelum gerai mulai melayani masyarakat. "Kalau bisa, setelah dibuka tidak boleh tutup. Ke depannya juga bisa buka 24 jam. Nanti pegawainya bergiliran agar masyarakat yang membutuhkan kebutuhan pokok bisa terpenuhi," ujar Mimik.

Untuk menunjang operasional koperasi, Mimik berencana berkoordinasi dengan Agrinas (Agro Industri Nasional) agar pasokan barang kebutuhan pokok dapat ditambah. Ia juga menekankan pentingnya pendataan anggota untuk memperkuat pengelolaan dan pengembangan usaha koperasi.

FENOMENA

Di Sidoarjo, pembangunan KDMP terus berjalan. Hingga kini, sebanyak 207 koperasi telah dibangun. Sebanyak 152 koperasi di antaranya telah menjalani proses verifikasi dan validasi (verval), sedangkan lebih dari 50 koperasi sudah beroperasi.

Mimik berharap peresmian KDMP dapat menjadi momentum untuk memperkuat keberadaan koperasi di daerah. Ia juga menyebut adanya rencana peresmian seluruh koperasi di Indonesia yang diharapkan berlangsung di GOR Sidoarjo. **(dik/vga)**

RADAR SIDOARJO.ID



DIKY SANSIRI/RADAR SIDOARJO

TUNTUT HAK: Kades Pranti Eko Purnomo membantah klaim Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar).

Kades Pranti Bantah Klaim Fasum Puskopkar

SEDATI-Polemik lahan di Desa Pranti, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, belum menemukan titik terang. Kepala Desa Pranti Eko Purnomo membantah klaim Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) yang menyebut lahan yang ditempati warga sebagai fasilitas umum (fasum). Dia meminta seluruh pihak membuktikan klaim kepemilikan berdasarkan dokumen hukum yang sah.

Eko menegaskan, warga memiliki dasar untuk mengajukan Sertifikat Hak Milik (SHM), salah satunya peta bidang yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 2007. Menurut dia, dokumen tersebut menunjukkan adanya perbedaan dengan site plan yang dijadikan dasar klaim Puskopkar.

Persoalan tersebut kembali mencuat dalam audiensi bersama Bupati Sidoarjo Subandi, Senin (12/10). Salah satu hal yang disoroti adalah status penyerahan lahan fasum kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo yang, menurut Eko, belum pernah dilakukan selama sekitar 30 tahun.

"Kalau sampai sekarang ada pernyataan bahwa makam itu merupakan fasum milik Puskopkar, saya bantah. Puskopkar bukan yang memberikan tanah itu kepada warga. Semuanya milik warga desa," tegas Eko sambil menunjukkan peta bidang terbitan BPN tahun 2007. **(dik/vga)**

RADAR SIDOARJO.ID

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Minta Proyek Dipercepat dan Normalisasi Sungai Terpadu

Sidoarjo, Memorandum

Bupati Sidoarjo Subandi melakukan sidak progres pembangunan betonisasi ruas Jalan Gedangan–Betro, Senin (12/10). Dalam peninjauan itu, Subandi meminta pelaksana proyek mempercepat pekerjaan yang mengalami deviasi sekaligus memastikan rencana normalisasi sungai di sekitar kawasan dapat dilaksanakan secara terpadu.

Sidak dilakukan bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM SDA) Kabupaten Sidoarjo Mukhammad Makhmud, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, serta pelaksana proyek.

Subandi menyampaikan bahwa pembangunan betonisasi jalan dengan nilai anggaran sekitar Rp23 miliar tersebut harus diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil peninjauan tadi, masih ada deviasi yang hampir 10 persen.

Padahal, penyelesaian proyek ditargetkan pada Desember 2026. "Masih ada deviasi 10 persen dari target yang harus dicapai hampir 34 persen dan bulan Desember 2026 harus selesai," ujar Subandi.

Ia meminta seluruh pihak yang terlibat segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah konkret untuk mengejar ketertinggalan progres. Koordinasi antara kontraktor, PPK, dan konsultan pengawas harus diperkuat agar kendala di lapangan dapat segera diselesaikan.



Bupati Sidoarjo sidak betonisasi Gedangsn-Betro.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan perlu diimbangi dengan penanganan saluran dan sungai di sekitarnya. Karena itu, ia meminta agar rencana normalisasi sungai turut jadi perhatian sehingga peningkatan kualitas jalan berjalan seiring dengan upaya mengurangi risiko banjir.

"Anggaran jalan ini kurang lebih Rp23 miliar. Kalau sudah dilakukan pembangunan, sekalian kita benahi sungainya agar normalisasi juga berjalan. Harapan kita, jalannya bagus dan normalisasi sungai juga terlaksana," katanya.

Subandi juga menyoroti sejumlah kendala di lapangan, di antaranya keberadaan kabel optik dan lampu yang mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Ia meminta agar persoalan tersebut segera dikoordinasikan dengan pihak terkait sehingga penanganannya tidak menghambat percepatan proyek.

Selain itu, penataan kawasan di sekitar jalan dan sungai juga perlu dilakukan sesuai perencanaan. Keberadaan warung, warung kopi, maupun bangunan yang berpotensi menghambat pekerjaan harus dikoordinasikan agar pelaksanaan konstruksi dan rencana normalisasi dapat berjalan optimal. **(hum/jok/fdn)**

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



Dipindai dengan CamScanner

ANGGER BONDAN/JAWA POS

Lima Jembatan Cor Hambat Betonisasi Gedangan–Betro

SIDOARJO – Keberadaan lima jembatan cor milik warga menjadi salah satu persoalan dalam penataan atau betonisasi Jalan Gedangan–Betro. Jembatan-jembatan tersebut bakal dibongkar agar tidak menganggu fungsi saluran air dan menghambat pembangunan.

TAK SESUAI STANDAR: Pemkab meminta seluruh jembatan cor yang menjadi akses warga dibongkar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo Muhammad Makhmud mengatakan, penataan jembatan dilakukan seiring dengan pengerjaan betonisasi jalan. "Jembatan harus dibongkar karena menghalangi aliran air," katanya kemarin (13/10).

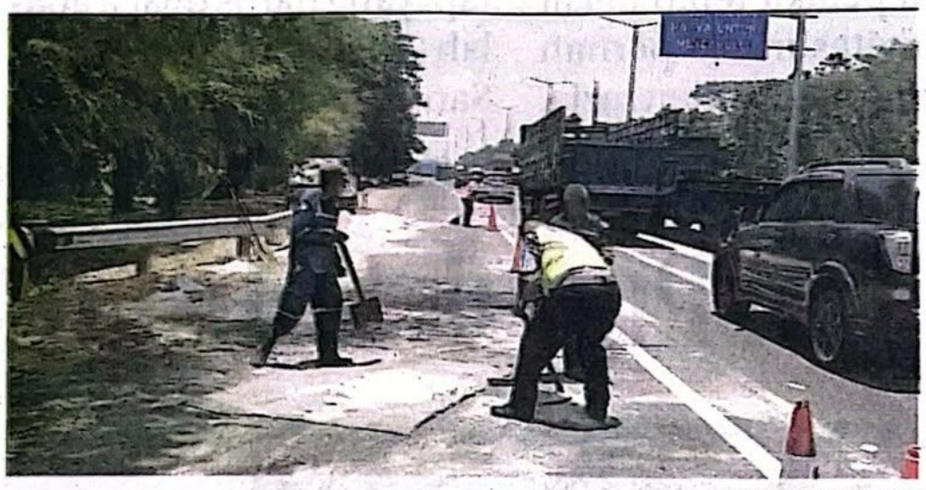
Menurut dia, jembatan seharusnya dibuat melengkung ke atas agar aliran air tetap lancar. Dalam pantauan *Jawa Pos*, terdapat sekitar lima jembatan cor yang melintasi sungai di sepanjang Jalan Gedangan–Betro. Jembatan tersebut digunakan sebagai akses menuju tempat usaha di tepi jalan.

Selain jembatan milik warga, pengerjaan betonisasi Jalan Gedangan–Betro juga berdampak pada lebar sungai di sisi jalan. Pelebaran jalan dari sekitar enam meter menjadi sembilan meter membuat sebagian sungai menyempit karena sebagian ruangnya digunakan untuk badan jalan. **(ful/hen)**

Jawa Pos

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



DITLANTAS POLDA JATIM

HAMBAT ARUS: Polisi bersama petugas Jasa Marga membersihkan kerupuk yang berserakan di Jalan Tol Sidoarjo.

Muatan Kerupuk Terlalu Tinggi, Pikap Terguling di Tol

SIDOARJO – Tumpukan kerupuk berserakan di ruas Tol Sidoarjo arah Waru, tepatnya di KM 755/B, kemarin (13/10). Sebuah pikap pengangkut kerupuk terguling saat mendahului kendaraan lain. Kecelakaan tersebut diduga dipicu muatan yang terlalu tinggi hingga membuat kendaraan kehilangan kestabilan.

Kanit PJR II Ditlantas Polda Jatim AKP Mulyani menjelaskan, kecelakaan berawal saat pikap bernopol W 9228 PF yang dikemudikan M. Yahya, warga Jombang, itu melaju dari arah Krembung menuju Waru. Menjelang KM 755, pengemudi berpindah dari lajur tengah ke lajur kanan untuk mendahului kendaraan lain.

Namun, kendaraan mendadak tidak stabil hingga akhirnya terguling. Muatan kerupuk yang dibawa pun tumpah dan memenuhi sebagian ruas jalan tol. "Karena muatan tinggi, kendaraan goyang-goyang. Pengemudi tidak bisa mengendalikan kendaraan lalu terguling," ujar Mulyani. **(eza/hen)**

Dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos

INFO MEDIA PERS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

nawatir klaim itu membuat dan [illegible]



ANGGER BONDAN/JAWA POS

MASIH KOSONG: Wabup Mimik Idayana mengecek stok barang di gerai KDMP Tambakrejo kemarin (13/10).

Pengurus Koperasi Merah Putih Masih Sulit Merekrut Anggota

SIDOARJO – Masih ada persoalan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang perlu dituntaskan. Jelang peresmian besok (15/10), pengurus KDMP Desa Tambakrejo masih kesulitan merekrut anggota. Meskipun, fasilitas gerai di koperasi telah siap dibuka.

Persoalan tersebut disampaikan pada Wabup Mimik Idayana saat sidak kemarin (13/10). Manajer KDMP Desa Tambakrejo Pratiwi menjelaskan, saat ini masih 30 orang yang menjadi anggota koperasi. Dia mengakui bahwa mengajak masyarakat bergabung sebagai anggota bukan perkara mudah. "Kami terus mendorong sosialisasi dan partisipasi masyarakat," kata Pratiwi.

KDKMP Tambakrejo dijadwalkan mulai beroperasi besok (15/10). Persiapan pun terus dikebut, terutama untuk memenuhi kebutuhan stok barang dagangan. Pengelola bekerja sama dengan sejumlah pemasok agar berbagai kebutuhan pokok tersedia saat koperasi mulai melayani masyarakat.

Pratiwi berharap kehadiran KDKMP dapat menarik minat warga, terutama karena koperasi tersebut diharapkan mampu menyediakan barang kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasaran. "Simpanan wajibnya Rp 100 ribu," jelas Pratiwi.

Wabup meminta koperasi beroperasi selama 24 jam. Dia meminta pengelola mendata anggota koperasi dan memastikan stok bahan pokok tersedia. "Tapi setelah dibuka jangan ditutup, kalau bisa lanjut 24 jam," katanya. **(ful/hen)**

Dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos

INFO MEDIA PERS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pasien Gangguan Pernapasan di RSUD Naik 363 Persen

SIDOARJO – Jumlah pasien dengan gangguan pernapasan di RSUD RT Notopuro Sidoarjo melonjak tajam pada September. Rumah sakit milik Pemkab Sidoarjo itu mencatat 403 pasien dengan diagnosis infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), pneumonia, dan bronkopneumonia. Angka tersebut meningkat 363 persen dibandingkan bulan Agustus yang hanya 87 pasien.

Plt Direktur RSUD RT Notopuro Sidoarjo dr Prima Dessy Kusuma mengatakan, pasien yang datang umumnya mengeluhkan batuk, pilek, demam, hingga badan meriang. Dari total 403 pasien selama September, sebanyak 193 orang menjalani rawat jalan, sedangkan 210 lainnya harus menjalani rawat inap.

Prima menjelaskan, pasien dengan keluhan ringan umumnya cukup menjalani rawat jalan. Namun, pasien yang memiliki penyakit penyerta berisiko membutuhkan perawatan lebih lanjut di rumah sakit. "Yang rawat inap mereka yang punya komorbid, seperti diabetes melitus, paru-paru kronis, ginjal hingga hipertensi," ujarnya.

Peningkatan pasien dengan keluhan serupa juga terjadi di RSUD Sidoarjo Barat (Sibar). Direktur RSUD Sibar dr. Abdillah Segaf Alhadad mengatakan, jumlah pasien yang mengeluhkan batuk meningkat sekitar 50 persen. **(ful/hen)**



> "Yang rawat inap mereka yang punya komorbid, seperti diabetes melitus, paru-paru kronis, ginjal hingga hipertensi."
>
> **dr Prima Dessy Kusuma**
> *Plt Direktur RSUD RT Notopuro*

Dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

POLRESTA



POLRESTA SIDOARJO

PEJABAT BARU: Wakapolresta Sidoarjo AKBP Fahrian Saleh Siregar (dua dari kiri) bersama Kasatreskrim Polresta Sidoarjo AKP Imam Mujali (kanan) mengikuti sertijab, Senin (12/10) sore.

Pernah Ungkap Asusila di Pesantren, AKP Imam Jabat Kasatreskrim

SIDOARJO – AKP Imam Mujali resmi menjabat Kasatreskrim Polresta Sidoarjo menggantikan Kompol Siko Sesaria Putra Suma. Imam pernah mengungkap perkara pencabulan yang melibatkan pengasuh pondok pesantren di Ponorogo pada Mei 2026.

Pergantian jabatan tersebut ditandai dengan prosesi serah terima jabatan (sertijab) di Mapolresta Sidoarjo pada Senin (12/10) sore. Selain kasatreskrim, jabatan wakapolresta juga berganti. AKBP M. Zainur Rofiq digantikan AKBP Fahrian Saleh Siregar.

Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing berharap pejabat baru segera beradaptasi dan melanjutkan tugas yang telah dijalankan pendahulunya. "Saya ingin pejabat baru ini mulai bisa segera bekerja melanjutkan tugas dari pejabat sebelumnya," ujarnya.

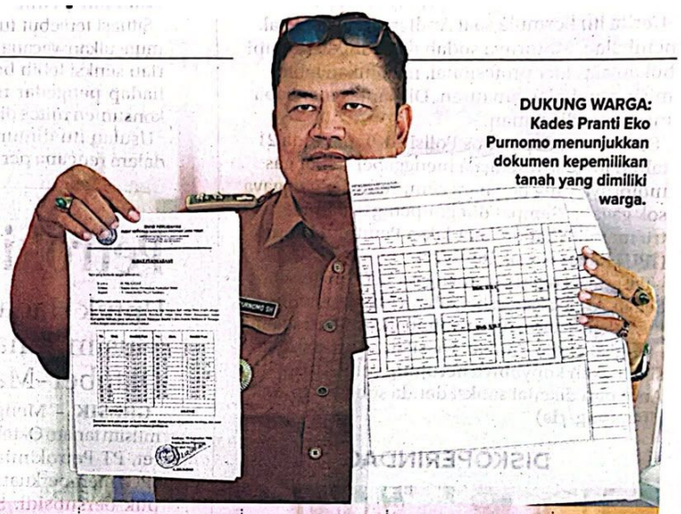
Imam bukan orang baru dalam penanganan perkara kriminal. Sebelum dipercaya memimpin Satreskrim Polresta Sidoarjo, dia pernah menjabat Kasatreskrim Polres Mojokerto dan Polres Ponorogo. **(eza/hen)**

Dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos

INFO MEDIA PERS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Lahan Tinggal Diklaim Fasum, Warga Pranti Protes



DUKUNG WARGA: Kades Pranti Eko Purnomo menunjukkan dokumen kepemilikan tanah yang dimiliki warga.

ANGGER BONDAN/JAWA POS

Penerbitan 94 SHM Terkendala Status Tanah

POLEMIK LAHAN DI DESA PRANTI

- Lebih dari **200** warga kesulitan mengurus SHM
- Proses SHM yang diurus sejak **2015** mandek
- Warga sempat **demonstrasi** ke BPN
- Muncul klaim lahan ditempati sebagai fasum

Sumber: Kades Pranti

SIDOARJO – Sebanyak 94 warga Desa Pranti, Sedati, masih menanti kepastian Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang mereka tempati. Pengurusan yang dimulai sejak 2015 itu tak kunjung tuntas setelah muncul persoalan klaim lahan sebagai fasilitas umum (fasum) oleh Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar).

Kepala Desa (Kades) Pranti Eko Purnomo membantah keras klaim Puskopkar yang menyebut lahan yang ditempati warga sebagai fasum. Menurutnya, pemdes memiliki peta bidang terbitan BPN tahun 2007 yang menunjukkan site plan jika hal tersebut bukan fasum. "Tanah tersebut diperoleh warga melalui proses jual beli hasil relokasi. Semuanya milik warga desa," kata Eko.

Dia juga memperlihatkan dokumen akad jual beli antara warga dengan Puskopkar pada 1996 sebagai bukti bahwa lahan tersebut sah milik warga. "Warga kami sudah lama menanti sertifikat. Jika tidak ada titik temu, kami akan mengadu ke kantor Wilayah BPN Jatim dan DPR RI," tambah Eko.

Warga Desa Pranti RT 04 RW 02 Abdul Wahab menjelaskan, kawasan permukiman ditempati setelah warga direlokasi karena perluasan Bandara Juanda pada 1994. Proses pengurukan dan penempatan warga berlangsung pada periode berikutnya dengan pembagian dua petak tanah untuk setiap kepala keluarga.

Abdul Wahab menyebut, warga membeli tanah melalui proses yang melibatkan pemerintah pada masa itu. Dia mengaku resah ketika tanah yang sudah ditempati diklaim sebagai fasum. "Saya khawatir klaim itu membuat kami semakin sulit mendapatkan kepastian hukum atas tanah kami," ujarnya.

Pemkab Kaji Polemik Lahan

Pengacara Puskopkar Hartono menjelaskan, Puskopkar dahulu berperan menyiapkan lahan bagi warga yang terdampak perluasan Bandara Juanda. Soal klaim Puskopkar jika lahan berstatus fasum, dirinya mengaku tidak tahu. "Soal itu saya tidak tahu," katanya singkat.

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR) Sidoarjo Moch Bachruni Aryawan mengatakan, pemkab meminta waktu hingga akhir Oktober untuk mengkaji polemik lahan di Desa Pranti. Pemerintah akan menelusuri dokumen dari masing-masing pihak sebelum menentukan langkah penyelesaian. "Dokumen yang akan diperiksa antara lain perizinan, proses penyediaan lahan, hingga berkas penerbitan sertifikat di BPN. Kami akan mempertemukan BPN, Puskopkar dan pemdes untuk mencocokkan dokumen yang dimiliki," kata Bachruni. **(ful/hen)**

Jawa Pos